

Family Hope Program: Fulfillment of the 3T Principles in Rice Social Assistance during the Covid-19 Pandemic in East Jambi District

Program Keluarga Harapan: Pemenuhan Prinsip 3T Pada Bantuan Sosial Beras Saat Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Jambi Timur

Riri Maria Fatriani^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

* Penulis Korespondensi: ririmariafatriani@unja.ac.id

Naomi Kartika Sari Butar Butar²

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Abstract

The Family Hope Program (PKH) rice social assistance which was implemented in east Jambi sub district at the Covid-19 pandemic was a program designed by government with aim of reduce the burden on community in meeting daily food needs. This purpose of the study to find out and analyze PKH rice social assistance policy has been in accordance with the principle of 3T (right target, right amount, and right time). This research uses qualitative method with descriptive type. There were 15 Informants, including from KPM east Jambi sub district, social service, the company of indonesia logistics bureau, PT. Bhandha Ghara Rexa and PKH facilitators in east Jambi sub district. The results of this study indicate that the implementation of the PKH rice social assistance policy at the covid-19 period in east Jambi sub district was is not all accordance with the 3T principles. Based on an analysis of environmental conditions, inter-organizational relationships, quantity and quality of implementor resources, as well as the characteristics and capabilities of implementing agents, it shows obstacles to implementor resources that have an impact on communication and the ability of implementing agents in distributing rice social assistance for the family hope program in east Jambi sub district.

Keywords: 3T Principles, Covid-19 Pandemic, Family Hope Program, Rice Social Assistance

Abstrak

Bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kecamatan Jambi Timur pada masa pandemi covid-19 merupakan program yang dirancang pemerintah dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan prinsip 3T (Tepat waktu, Tepat sasaran dan Tepat jumlah) pelaksanaan kebijakan bantuan sosial beras PKH di Kecamatan Jambi Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan berjumlah 15 orang yang diantaranya berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Jambi Timur, Dinas Sosial, Perum Bulog, PT. Bhandha Ghara Rexa dan Pendamping PKH Kecamatan Jambi Timur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial beras PKH pada masa covid-19 di Kecamatan Jambi Timur belum semua sesuai dengan prinsip 3T. Berdasarkan analisis kondisi lingkungan, hubungan antar organisai, kuantitas dan kualitas sumber daya Implementor, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, menunjukkan hambatan pada sumber daya implementor sehingga berdampak pada komunikasi dan kemampuan agen pelaksana dalam penyaluran batuan sosial beras program keluarga harapan di Kecamatan Jambi Timur.

Kata kunci: Bantuan Sosial Beras, Pandemi Covid-19, Prinsip 3T, Program Keluarga Harapan,

Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease 2019* atau biasa dikenal masyarakat sebagai Covid-19 menimbulkan dampak dan kekhawatiran luar biasa bagi masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu dampak signifikan yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memicu tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan

suatu kondisi krusial yang wajib menjadi perhatian pemerintah baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Permasalahan kemiskinan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan dimulai dari pemenuhan materi, kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan hingga sosial budaya masyarakat. Maka dari itu kemiskinan juga berpengaruh dengan penyebab ketertinggalan dan penghambat pembangunan suatu negara. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan dan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto, 2013).

Persoalan Kemiskinan ini menjadi fokus di semua negara, baik pada negara maju dan negara berkembang yang mana menemui tingkat persoalan yang berbeda. Begitu pula Indonesia sebagai salah satu negara yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi dengan standar pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang kurang seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, Pendidikan dan Kesehatan. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan memberikan dana bergulir, pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Dengan upaya yang telah tersebut tetap belum sepenuhnya teratasi.

Pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), program ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin terbawah berupa bantuan bersyarat. Dengan program PKH ini diharapkan mampu menyumbang untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium yaitu *Millenium Development Goals* atau yang dikenal dengan nama MDGs, dengan tujuan pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pengurangan angka kematian bayi dan balita serta dapat menekan angka kematian ibu melahirkan (Depsos, 2010).

Pemerintah melalui kementerian sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang sosial dengan tujuan mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin (Bismi, Taher, & Anjar, 2021). Sasaran penerima program ini adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia, dan disabilitas berat (Akmala, 2017). PKH sebagai program yang direncanakan secara terpusat, pelaksanaannya banyak aspek dan pihak ikut terlibat. Dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari implementasi kebijakan pelaksanaan program.

Pelaksanaan program kemiskinan ini diatur melalui pembentukan tim koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu Perpres No 96 Tahun 2015 perubahan atas peraturan sebelumnya dimana pembentukan tim koordinasi ditegaskan dan diatur Kembali melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 sebagai landasan dalam melaksanakan tugas penanggulangan di daerah, isinya memuat tentang penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui TNP2K tetapi daerah juga diberikan kewenangan untuk menjalankan program kemiskinan melalui TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi bertugas untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan di lingkup provinsi bagitu pula lingkup Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten/Kota keanggotaan TKPK dibantu oleh OPD yang membidangi permasalahan sosial kemiskinan. Tim pelaksana PKH di Kota Jambi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Sosial Keluarga No 20/3.4/KP.03/1 Tentang pengangkatan pendamping Program Keluarga Harapan (Berasa, 2021).

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang Kota/Kabupatennya menjalankan PKH, Kota Jambi dengan 11 kecamatannya semua menjalankan PKH dimulai dari tahun 2012. Dari 11 kecamatan tersebut kecamatan Jambi Timur tahun 2020 merupakan wilayah

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak dari kecamatan lainnya yaitu sebanyak 2306 KPM (Sekretariat PKH Dinas Sosial Kota Jambi, 2021). Selain KPM terbanyak di Kota Jambi, Kecamatan Jambi Timur merupakan wilayah yang belum mendapatkan sosialisasi tentang bantuan sosial pemerintah, teridentifikasi temuan beras tidak layak konsumsi, penyaluran bantuan tertunda sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Butar Butar, 2021).

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Jambi Timur pernah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menemukan bahwa implementasi PKH sudah dilaksanakan namun tidak efektif dilihat dari aspek efektivitas, belum tepat sasaran, sosialisasi tidak melibatkan masyarakat (Berasa, 2021). Begitu pula dengan penelitian kedua dilakukan di kecamatan Jambi Timur menggunakan perspektif ilmu pemerintahan dan metode penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif dengan penelitian implementasi bantuan sosial beras program keluarga harapan, pada pengawasan dan implementasinya pada masa pandemi covid-19 (Butar Butar, 2021). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas implementasi PKH di Kecamatan Jambi Timur, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada pemenuhan prinsip 3T dengan menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi implementasi dalam kebijakan publik pada pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH saat pandemi covid-19. Prinsip 3T ini merupakan hal penting yang dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial, walaupun dalam mekanisme penyaluran sudah disiapkan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis PKH namun di lapangan tidak menjamin dalam pelaksanaannya dan penerima bantuan sudah sesuai dengan pemenuhan prinsip 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk memperoleh data yang valid menggunakan pedoman wawancara melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dengan menentukan kriteria-kriteria informan yang kredibel. Berikut kriteria informan pada penelitian ini:

1. Pihak berwenang dalam hal ini yang mengawasi jalannya PKH
2. Koordinator pelaksanaan di lapangan
3. Memahami alur distribusi untuk PKH
4. Masyarakat KPM PKH Kecamatan Jambi Timur yang memenuhi syarat

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan tiga teknik antara lain, pertama, wawancara dilakukan untuk mencari tahu bagaimana standar alur pendistribusian terhadap KPM PKH. Kedua, observasi yaitu mencari tahu dengan mengamati aktivitas penyaluran yang dilakukan. Ketiga, dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan foto dan tulisan serta kebijakan yang melengkapi penelitian tentang PKH.

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2017, p.246). Dengan Teknik pertama, Reduksi Data (*Data Reduction*) sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, *focusing*, dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada kemudian dirangkum, memfokuskan hal yang penting, memilah hal yang pokok, kemudian mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi menghasilkan gambaran yang jelas sehingga dapat memilah data yang sesuai dan dibutuhkan untuk menganalisis implementasi PKH. Langkah selanjutnya memisahkan data yang tidak penting serta lebih memfokuskan pada data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, Penyajian Data (*Data Display*) berupa uraian dengan teks naratif, gambar dan tabel, sehingga dapat menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan prinsip 3T implementasi PKH dilaksanakan. Ketiga, yaitu Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), menyaring dan merangkai intisari hasil penelitian berdasarkan sumber data primer dan sekunder dengan diperoleh simpulan jawaban tentang implementasi pemenuhan prinsip 3T PKH di Kecamatan Jambi Timur.

Hasil dan Diskusi

Pandemi covid-19 merupakan wabah yang berdampak melumpuhkan hampir Sebagian besar aktivitas masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik sebagai respon dalam alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan sosial beras bagi KPM PKH merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan beras saat pandemi covid-19 selama tiga bulan. Upaya penyaluran bantuan sosial beras ini menggunakan prinsip 3T yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Dengan prinsip 3T diharapkan dapat disalurkan kepada KPM PKH di Kecamatan Jambi Timur. Prinsip 3T ini akan dianalisis dengan menggunakan teori Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tentang empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik antara lain, hubungan antar organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, sumber daya organisasi, dan kondisi lingkungan.

Tepat Sasaran; Dimaksudkan agar Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan diberikan kepada KPM PKH yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan data tersebut diolah oleh pemerintah pusat data dan informasi kesejahteraan sosial. Dengan harapan tepat sasaran diperlukan pendataan secara berkala sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan bantuan.

Tepat Jumlah, yaitu jumlah bantuan beras yang merupakan hak KPM PKH sebanyak 45Kg selama tiga bulan, dialokasikan kepada setiap KPM PKH seberat 30 Kg di periode bulan agustus sampai dengan bulan September dan selanjutnya di bulan oktober disalurkan kembali seberat 15 Kg.

Tepat Waktu; waktu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras kepada KPM PKH direncanakan dari awal dan disepakati Bersama implementor yakni pihak Perum Bulog Dinas Sosial Kota Jambi, Pendamping PKH dan PT. Bhandha Ghara Reksa. Dengan disalurkan bantuan sosial beras ini dapat membantu masyarakat memenuhi salah satu kebutuhan primernya.

1. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program kebijakan, Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan Kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Adapun indikator pertama adalah hubungan antar organisasi terdiri dari ketepatan konsistensi dan kualitas komunikasi antar instansi, kejelasan dan konsistensi sasaran program serta pembagian fungsi antar instansi. Hasil penelitian dapat terlihat masih belum sejalan dengan pernyataan beberapa informan lain yang dijadikan triangulasi data, sehingga bisa disimpulkan belum memenuhi prinsip 3T. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Jambi sebagai pelaksana dan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan pendamping PKH, PT. Bhandha Ghara Reksa Cabang Palembang serta Perum Bulog Kanwil Jambi. Mengenai kualitas komunikasi, Dinas Sosial sebagai Instansi pemerintah beserta mitra kerja lainnya saling berkomunikasi dalam penyaluran bantuan sosial beras kepada PKM PKH, namun komunikasi yang

dilakukan terdapat kekeliruan dalam pembagian tugas dan fungsi sehingga menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Pembagian tugas dan fungsi pada tiap instansi sangat diperlukan agar program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Untuk memaksimalkan hal tersebut maka setiap pelaksana memiliki tupoksi sendiri. Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH ini Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai *leading* dengan cara saling berkoordinasi antar mitra kerja. Pendamping PKH bertanggung jawab atas mensosialisasikan program bantuan beras dan memastikan bahwa KPM PKH mendapatkan bantuan. PT. Bhanda Ghara Rekha sebagai transporter memiliki tugas dan tanggung jawab menyalurkan beras dari Gudang bulog kepada KPM, dan Perum Bulog tugas dan fungsinya penyedia komoditi beras yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam bantuan sosial beras PKH.

Hal penting yaitu komunikasi yang terjalin antar pelaksana bantuan sosial beras sudah berjalan namun kualitas komunikasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa belum maksimal. Ditemukan adanya sosialisasi yang tidak merata bagi KPM lansia dan KPM kategori memiliki anak balita dan batita tidak mendapatkan bantuan. Dengan fakta lapangan tersebut perlunya koordinasi dan komunikasi efektif sehingga tidak menimbulkan masalah antar Dinas Sosial serta Pendamping PKH dalam menyampaikan informasi terkait bantuan-bantuan sosial. Sehingga dapat dikatakan pada faktor hubungan antar organisasi belum terwujud pemenuhan dari prinsip 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah).

2. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Indikator kedua yaitu karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah hal yang sangat penting harus dimiliki oleh tiap instansi guna menunjang keberhasilan program. Menurut Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli menjelaskan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program (Subarsono, 2005). Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterampilan teknis dan manajerial serta kemampuan untuk koordinasi serta mengontrol belum dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial telah mempersiapkan dan melatih kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dengan program-program dibentuk pemerintah, namun Kembali pada struktur birokrasi, norma dan pola hubungan dalam birokrasi tersebut belum semua dapat memahami pentingnya melakukan perubahan dengan bertransformasi mendapat pengetahuan terbaru dan memotivasi diri dalam mengambil inisiatif dalam menunjang kinerja menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.

Kemampuan teknis dan manajerial tidak begitu saja muncul dalam kepribadian seseorang, namun tercipta dari proses yang panjang dan perlahan diiringi dengan proses pembelajaran, Dinas Sosial telah melakukan hal tersebut kepada tiap SDM baik kepada Pendamping PKH, E-Warong, dan pihak-pihak internal Dinas Sosial lainnya. Kemudian terkait kemampuan untuk mengkoordinasi dan mengontrol program, berdasarkan hasil analisis diperoleh data implementor sudah melakukan koordinasi serta mengontrol dengan cara terus berkomunikasi secara internal sehingga terciptanya koordinasi. Dinas Sosial dan Perum Bulog sudah memperkuat kemampuan untuk saling mengontrol dan berkoordinasi seperti pada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta PKH bahkan sebelum masa pandemi Covid-19. Berdasarkan keterangan

Pendamping Kecamatan Jambi Timur, karena pihak PT. Bhandha Ghara Reksa (BGR) berada di luar wilayah Kota Jambi maka dibutuhkan persiapan yang lama dari PT. Bhandha Ghara Reksa maka dari itu penyaluran beras terhambat. Maka dari itu, pemenuhan prinsip 3T pada faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana belum memenuhi prinsip tepat waktu.

3. Sumber Daya Organisasi

Indikator ketiga yakni sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi serta sumber daya fasilitas. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dari Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH ini ialah pihak internal dari Dinas Sosial itu sendiri. Tiap-tiap instansi atau Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam program ini sudah menyediakan sumber daya manusia untuk ikut serta memaksimalkan pelaksanaan ini. Selain sumber daya manusia, sumber daya fasilitas juga tak kalah penting untuk memaksimalkan penerapan program Bantuan Sosial Beras PKH. Sumber daya fasilitas dapat berupa sarana dan prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan program. Sumber daya fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial yakni E-Warong sebagai titik distribusi Bantuan Sosial Beras dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimiliki oleh tiap KPM PKH sebagai alat pembayaran. PT. BGR Cabang Palembang sebagai transpoter juga menyediakan fasilitas armada angkutan berupa truk yang akan digunakan untuk mengangkut beras dari gudang Bulog menuju E-warong di Kecamatan Jambi Timur.

Adapun fasilitas gudang penyimpanan beras yang disediakan oleh Perum Bulog yakni gudang daerah Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, Tanjabbar serta Tanjabtim serta 3 gudang di wilayah Kota Jambi yakni Jambi, Muara Jambi dan Batanghari. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sementara bahwa para implementor saling mempersiapkan sumber daya manusia serta sumber daya fasilitas dengan sebaik mungkin untuk menunjang pencapaian tujuan program serta kelancaran program. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mewujudkan suatu kebijakan, karena sebaik apapun strategi dan sistem kebijakan tersebut yang dirancang dengan sedemikian rupa namun pada nyatanya sumber daya manusia organisasi tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab serta komitmen dalam penerapan kebijakan itu, maka akan muncul persoalan dan kebijakan berujung kurang maksimal akibatnya tidak tepat waktu penyaluran bantuan sosial beras tersebut. Pada analisis sumber daya organisasi ditemukan bahwa sumber daya manusia yaitu dalam hal ini adalah pendamping PKH tidak bisa selalu maksimal dalam memanfaatkan fasilitas untuk melaksanakan kinerjanya. Dikarenakan jumlah KPM yang semakin bertambah, sedangkan pendamping PKH beberapa kali ditempatkan dua kelurahan. Salah satu pekerjaannya memeriksa atau diperbaharui data-data penerima KPM. Seperti KPM PKH yang telah meninggal dunia, pindah rumah, ataupun pulang kampung. Karena penerima KPM di Jambi Timur per tiap kelurahan banyak jumlahnya, sehingga beberapa pendamping tidak maksimal. Akibatnya beberapa KPM tidak tepat sasaran dalam menerima bantuan sosial beras dari pemerintah.

4. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang dimaksud bukanlah seperti yang dipelajari dalam ilmu biologi tetapi digunakan untuk mengidentifikasi struktur pembagian kebijakan, kendala sumberdaya, sosio kultural serta tersedianya infrastruktur fisik serta fasilitas publik yang cukup. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan

Bantuan Sosial Beras PKH ini, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Terkait struktur pembagian kebijakan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH, implementor memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Sebagaimana Dinas Sosial Kota Jambi beserta Pendamping PKH Kecamatan Jambi Timur yang menjalankan tupoksi masing-masing. Dikarenakan sudah ada pembagian bidang, maka memang benar-benar terfokus untuk menjalankan tugas dalam penyaluran Bantuan Sosial Beras PKH. Demikian juga dari PT. Bhandha Ghara Reksa Cabang Palembang.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa setiap implementor memahami dan mengetahui tupoksi terkait program Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan. Hal tersebut memang sangat diperlukan mengingat bahwa pada masa Pandemi Covid-19 ini Pemerintah banyak mengimplementasikan berbagai kebijakan mengenai bantuan sosial bagi masyarakat. Ketika para implementor memiliki tupoksi yang jelas maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih nyaman untuk menjalankan program ini.

Sosio kultural merupakan kebiasaan yang melekat pada masyarakat serta menjadi ciri pada masyarakat yang bersangkutan. Terkait sosio kultural, tidak ada budaya masyarakat yang menyebabkan pertentangan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras PKH di Kecamatan Jambi Timur. Adapun mengenai ketersediaan infrastruktur fisik serta fasilitas publik yang cukup dalam penyaluran Bantuan Sosial Beras PKH ini sudah cukup menunjang, relatif memadai dan tidak ada kekurangan dikarenakan berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan, akses jalan menuju Kecamatan Jambi Timur dapat dikatakan bagus serta lokasi E-Warong sebagai titik penyaluran beras memiliki fasilitas yang memadai seperti lapangan parkir.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran Bantuan Sosial Beras kepada KPM PKH selama masa pandemi dengan pemenuhan prinsip 3T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Jumlah) masih ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini lebih banyak disebabkan proses komunikasi kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak maksimal, Data-data penerima KPM PKH tidak diperbaharui dalam jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan data penerima tidak valid sehingga beberapa bantuan tidak tepat sasaran. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping PKH tidak cakap karena cukup sulit mengurus atau menangani KPM lebih dari satu kelurahan, maka diperlukan persiapan pelatihan kecakapan Pendamping PKH yang handal juga dilengkapi dengan fasilitas dalam menjalankan tugas.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Referensi

- Akmala, C.F. (2017). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2020). *Kecamatan Jambi Timur Dalam Angka*.
- Berasa, S.S., Muhammad, Y., & Fatriani, R.M. (2021). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Jambi Timur*: Skripsi, UNJA
- Butar-butur, N.H., Fatriani, R.M., Hartati, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Jambi Timur*: Skripsi, UNJA.
- Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras*.

Muhammad, B., Taher, A., & Anjar, Y.A. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 6(3), 1-15

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*.

Peraturan Presiden Tentang *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* Nomor 166 Tahun 2014

Purwanto, S., Sumartono., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96

Sosial, Departemen. (2010). *Program Keluarga Harapan*.

Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta